

SKRIPSI

POLITIK UANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**(Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur Tahun 2015 di
Kecamatan Pekalongan)**

Oleh:

**NENI MEILINDA
NPM. 1288644**



Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan: Ekonomi Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1437 H/ 2017

POLITIK UANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung
Timur 2015 di Kecamatan Pekalongan)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)

Oleh:

NENI MEILINDA
NPM. 1288644

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH

Pembimbing II : Imam Mustofa, M.SI

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1438 H / 2017 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

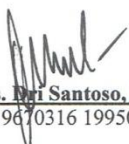
PERSETUJUAN

Judul Skripsi : POLITIK UANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi
pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur 2015 di
Kecamatan Pekalongan)

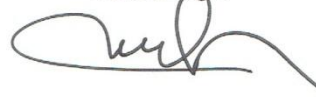
Nama : Neni Meilinda
NPM : 1288644
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Telah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Drs. Pri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Juli 2017
Pembimbing II


Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Sdr. Neni Meilinda

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Neni Meilinda
NPM : 1288644
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : POLITIK UANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi
pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur 2015 di
Kecamatan Pekalongan)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001


Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-024/In.23/FEBI/PP.009/08./2017

Skripsi dengan judul: POLITIK UANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur 2015 di Kecamatan Pekalongan) disusun oleh NENI MEILINDA, NPM. 1288644, Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis, 27 Juli 2017.

TIM MUNAQSAH

Ketua/Moderator	: Drs. Dri Santoso, M.H.	(.....)
Penguji I	: Nizaruddin, S.Ag.M.H	(.....)
Penguji II	: Imam Mustofa, M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Aulia Rani Priyatna, M.E.Sy	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhaya Ninsiana, M.Hum
NIR.09.20923 200003 2 002

ABSTRAK

POLITIK UANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**(Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur Tahun 2015 di
Kecamatan Pekalongan)**

Oleh:

NENI MEILINDA

Praktek Politik Uang khususnya dalam pemilihan Kepala Daerah selalu dipakai dalam proses memenangkan calon Kepala Daerah dalam pemilihan umum secara langsung. Selain itu mereka melakukan *money politic* atau politik uang caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat agar rakyat memilih mereka, hal ini merupakan penyimpangan dari demokrasi. Bentuk politik uang ini bermacam-macam, ada dengan cara langsung menyuap pemilih dengan sejumlah uang tertentu untuk satu suara, dengan cara memberikan sumbangan bermotif politik, menjanjikan sesuatu untuk mendapatkan uang secara illegal demi modal politik, dan lain-lain. Dalam hal ini rakyatpun dengan senang hati menerima bantuan dari para calon Kepala Daerah, bagi rakyat bantuan semacam itu dianggap sebuah rejeki. Bahkan sudah menjadi kebiasaan ketika menjelang pemilihan rakyat selalu mengharapkan bantuan atau sumbangan dari calon kepala daerah. Para calon kepala daerah memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari perhatian dari rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik uang jika ditinjau dari prinsip Ekonomi Islam, dan untuk mengetahui Politik Uang yang terjadi di Kecamatan Pekalongan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif Ekonomi Islam terhadap Politik Uang menjelang pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur tahun 2015 di Kecamatan Pekalongan, dan apa sajakah bentuk-bentuk bantuan dari para calon Kepala Daerah, kemudian bagaimana cara pemberian bantuan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research*, Adapun sumber data yang peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data skunder, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi . Wawancara dilakukan kepada Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan masyarakat sekitar. Dokumentasi digunakan untuk mendukung data-data yang penelitian dapatkan dilapangan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neni Meilinda
NPM : 1288644
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017

Yang menyatakan



Neni Meilinda

1288644

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa’ : 58)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak (Alm) saya tercinta yang selama ini telah memberikan dukungan untuk saya baik berupa materi maupun doa, terimakasih banyak untuk kedua orang tua saya terutama untuk ibu yang tak henti-hentinya mendoakan saya, dan untuk alm Bapak yang telah menjadi penopang hidup saya selama hidupnya.
2. Kakak-kakak saya yang selalu menyemangati dan mendukung saya dalam menempuh pendidikan, terimakasih atas dukungannya selama ini.
3. Sahabat-sahabat saya, Siti Komsinah, Megawati, Dwi Hapsari, Rika Apriliawati, Eka Feri, dan juga teman-teman lainnya, terimakasih telah memberikan semangat dan bantuannya, dan selalu menghibur saya ketika merasa sedih.
4. Rekan-rekan mahasiswa/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2012.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (SI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Jurusan Ekonomi Syariah guna memperoleh gelar SE.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Bapak Drs. Dri Santoso, MH dan Bapak Imam Mustofa, M.SI, selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen / Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu sarana dan prasarana selama penulis menempuh pendidikan. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil dari penelitian yang dibuat kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juli 2017

Peneliti



Neni Meilinda
NPM. 1288644

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Nota Dinas.....	iv
Halaman Pengesahan	v
Abstrak	vi
Halaman Orisinilitas Penelitian.....	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan	ix
Halaman Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar lampiran	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pertanyaan penelitian.....	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian	6
D. Penelitian relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Politik Uang Dalam Pilkada	9
1. Pengertian Politik Uang.....	9
a. Batasan-Batasan Politik Uang	11
b. Dampak Politik Uang	13
c. Dasar Larangan Politik Uang.....	16
2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	17
a. Pengertian Pilkada	17

b. Pilkada Langsung.....	18
B. Ekonomi Islam	19
a. Pengertian Ekonomi Islam	19
b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian.....	24
B. Sumber data.....	25
C. Teknik pengumpulan data.....	26
D. Teknik analisis data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pekalongan	31
B. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kecamatan Pekalongan	36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud dari pesta Demokrasi, dimana pada saat itu rakyat terlibat langsung dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebelum pemilihan kepala daerah berlangsung calon kepala daerah beserta tim suksesnya, Mereka melakukan kampanye dari satu tempat ke tempat lain, maksud dan tujuan kampanye tersebut tidak lain mengenai visi dan misi mereka sebagai calon Kepala Daerah dan jauh yang lebih penting dari semua itu adalah agar masyarakat memilih calon kepala daerah tersebut. Biasanya, calon kepala daerah menjanjikan segala sesuatu, apapun itu bentuknya baik untuk kepentingan rakyat setempat maupun untuk memajukan perekonomian daerah tersebut.

Namun pada saat kampanye berlangsung tidak bisa dipungkiri akan terjadi penyelewengan yang berupa *money politics*, dalam permainan politik uang, seorang calon kepala daerah beserta tim suksesnya harus menguasai benar kondisi di lapangan.

Praktek politik uang khususnya dalam Pilkada tidak bisa dibiarkan terus menerus berlangsung, dengan adanya praktek politik uang mengakibatkan makin suburnya budaya NKK (Nepotisme, Kolusi , dan

Korupsi) yang hanya menguntungkan sekelompok kecil anggota masyarakat dan merugikan kebanyakan anggota masyarakat.¹

Politik uang (*money politic*) selalu dipakai dalam proses memenangkan calon Kepala Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum secara langsung. Calon Kepala Daerah Propinsi serta Kabupaten/Kota dalam proses pencalonan mengeluarkan biaya Pemilu cukup besar. Maka memiliki dampak luas, khususnya terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah.²

Selain itu hal yang paling parah ialah mereka melakukan *money politic* atau politik uang. Caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat agar rakyat memilih mereka, hal ini merupakan penyimpangan dari demokrasi. Tetapi tidak sedikit rakyat yang lebih pintar, memanfaatkan mereka yaitu dengan cara mereka tetap mengambil uang yang para calon berikan tetapi masyarakat tidak memilih mereka. Sungguh inilah yang merusak esensi dari demokrasi.³

Politik uang adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Ada banyak cara politik uang dilakukan oleh para aktor pilkada. Wahyudi Kumorotomo (2009) menyebutkan ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam pilkada. Menurutnya, politik uang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari “tim sukses” calon tertentu kepada konstituen yang potensial, sumbangan dari para bakal calon kepada partai politik yang telah mendukungnya, atau “sumbangan wajib” yang disyaratkan oleh suatu partai politik kepada para kader partai

¹ Purbayu Budi Santosa, “Gangguan Politik Uang Terhadap Pembangunan” dalam *Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, No. 1/ Maret 2006, h. 19

² Didik Suharianto, “Dampak Money Politics Hasil Pemilu Kepala Daerah Terhadap Konstitusi Dan Kebijakan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Ilmiah PROGRESIF*, No. 21/desember 2010, h.1

³ *Ibid*, h.2

politik. Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya.⁴

Persaingan dan perebutan kekuasaan setiap kali terjadi pada saat pemilu dilaksanakan. Berbagai cara dilakukan oleh para calon Kepala Daerah untuk mendapatkan kekuasaan atau jabatan yang diinginkan. Mulai dari memberikan bantuan, baik berupa bantuan barang atau jasa, seperti bantuan atau sedekah berupa pakaian, sembako, uang tunai, dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari rakyat untuk memenangkan posisi kedudukan atau jabatan yang diinginkan.

Orang yang memilih pemimpin melalui Pemilu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi. Jika mereka memilih calon yang tidak layak sebagai pemimpin, karena menerima uang atau sogokan (*money politics*), berarti ia telah melakukan dosa besar. Hal itu menurut Qaradhawi sama dengan memberikan kesaksian palsu dalam perkara peradilan. Begitu juga jika rakyat memilih memberikan suaranya kepada calon dengan pertimbangan bahwa calon itu kerabat atau orang yang berasal satu daerah dengannya atau karena akan mendapatkan keuntungan pribadi, berarti memilih demikian telah menyalahi perintah Allah.⁵

Mengingat politik uang terlarang dalam agama dan berakibat demokrasi pemilu ternodai dan tidak menghasilkan para pemimpin yang amanah dan ahli, maka politik uang ini harus dicegah atau ditanggulangi.

⁴ Fitriyah, "Cara Kerja Politik Uang : Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati", *POLITIKA*, No. 2/Oktober 2015, h. 101.

⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 193

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah lama mengeluarkan fatwa yang mengharamkan politik uang ini, karena dianggap sebagai *risywah* (sogokan).⁶

Politik uang (*money politic*) selalu dipakai dalam proses memenangkan calon Kepala Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum secara langsung. Calon Kepala Daerah Propinsi serta Kabupaten/Kota dalam proses pencalonan mengeluarkan biaya Pemilu cukup besar. Maka memiliki dampak luas, khususnya terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah.⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Adijaya kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur, pada massa kampanye para calon kepala daerah berlomba untuk mendapatkan simpatik atau suara dari rakyat dengan cara memberikan bantuan atau sumbangan berupa uang tunai, sembako, dan lain-lain, akan tetapi mereka juga meminta dukungan dari setiap penerima bantuan. Dalam hal ini rakyatpun dengan senang hati menerima bantuan dari para calon kepala daerah, bagi rakyat bantuan semacam itu dianggap sebuah rejeki. Bahkan sudah menjadi kebiasaan ketika menjelang pemilihan rakyat selalu mengharapkan bantuan atau sumbangan dari calon kepala daerah. Para calon kepala daerah memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari perhatian dari rakyat.

Bentuk politik uang ini bermacam-macam, ada dengan cara langsung menyuap pemilih dengan sejumlah uang tertentu untuk satu suara,

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa MUI*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), h

⁷ Didik Suhariato, "Dampak Money Politics Hasil Pemilu Kepala Daerah Terhadap Konstitusi Dan Kebijakan Pemerintah Daerah", *Jurnal Ilmiah PROGRESIF*, No. 21/desember 2010, h.1

dengan cara memberikan sumbangan bermotif politik, menjanjikan sesuatu untuk mendapatkan uang secara illegal demi modal politik, dan lain-lain.⁸

Bagi para calon kepala Daerah, jelas sekali hal tersebut ada maksud dan tujuan tertentu. Semua itu diberikan tentu tidak dengan cuma-cuma. Tujuannya adalah untuk mendapatkan apresiasi atau suara dari rakyat untuk mendapatkan posisi yang diinginkan oleh para calon Kepala Daerah.

Berdasarkan keterangan di atas, menerangkan bahwa telah dilaksanakan politik uang menjelang pemilihan Kepala Daerah di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur, dan hampir setiap warga mendapatkan bantuan-bantuan tersebut, kemudian bagaimanakah prinsip Ekonomi Islam terhadap Politik Uang yang dilakukan oleh para calon Kepala Daerah pada saat menjelang pilkada? Dari masalah tersebut menginspirasi peneliti untuk menuangkan masalah tersebut kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **Politik Uang Perspektif Ekonomi Islam** (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur 2015 di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan, maka rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah perspektif Ekonomi Islam tentang Politik Uang menjelang Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur pada tahun 2015 di Kecamatan Pekalongan?

⁸ Zulkarnain, "Kajian Penegakan Hukum Pasca Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal KONSTITUSI*, (Puskasi FH Universitas Widyagama Malang), No.2/ November 2010, h.92

2. Apa sajakah bentuk-bentuk bantuan dari para calon Kepala Daerah?
3. Bagaimanakah cara pemberian bantuan tersebut?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap politik uang menjelang pemilihan Kepala Daerah yang terjadi di kecamatan pekalongan.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk bantuan dari para calon Kepala Daerah.
3. Untuk mengetahui cara pemberian bantuan tersebut kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai politik uang khususnya dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang politik uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, yang terjadi pada pemilihan Kepala Daerah.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat hasil penelitian yang menunjukkan masalah yang akan dibahas.⁹

Berdasarkan penelusuran penulis diperpustakaan IAIN Metro, sejauh ini peneliti belum mendapatkan skripsi yang mengkaji tentang Politik Uang di desa Adijaya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelusuran dari artikel. Dalam Artikel yang peneliti temukan di internet terdapat permasalahan yang berbeda. Menurut hasil penelusuran melalui internet, peneliti mendapat artikel yang berjudul “Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada Dan Pilkadaes Dikabupaten Pati)” yang di susun oleh Fitriyah.¹⁰

Dalam artikel tersebut, Fitriyah (Penulis Artikel) membahas tentang cara kerja politik uang yang terjadi pada saat Pemilu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih spesifik pada politik uang dalam Perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan hal tersebut, terdapat persamaan yaitu membahas tentang Politik Uang namun ada sedikit perbedaan yaitu penulis lebih fokus ke Perspektif ekonomi Islam, sedangkan artikel tersebut fokus membahas cara kerja politik uang.

Seperti halnya Tulisan karya Didik Suharianto, yang berjudul Dampak Money Politics Hasil Pemilu Kepala Daerah Terhadap Konstitusi

⁹ Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.39

¹⁰ Fitriyah, “*Cara Kerja Politik Uang*”, h. 95.

Dan Kebijakan Pemerintah Daerah, dalam artikel tersebut fokus membahas tentang dampak yang terjadi akibat *money politic*.¹¹

Kemudian tulisan karya Mashudi Umar, MA, yang berjudul Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam, beliau menuliskan bahwa hampir semua pemilihan umum diwarnai praktik politik Uang, bahkan perilaku money politik seringkali diatas namakan sebagai bantuan, infak, sedekah, dan lain sebagainya.¹²

Sehubungan dengan permasalahan politik uang yang peneliti teliti dari beberapa karya diatas peneliti mengambil bagian-bagian yang berkaitan dengan politik uang, guna melengkapi penelitian yang peneliti lakukan.

¹¹ Maisarah, "*Faktor-faktor*", h. 6.

¹² Didik Suhariato, "*Dampak Money politic*", h. 4

BAB II

LANDASAN TEORI

A. POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

1. Politik Uang

1) Pengertian

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.¹

Menurut PP 151/2000, yang dimaksud dengan politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah.²

Terjemahan *money politic* dalam bahasa Indonesia adalah politik uang. Dalam bahasa Indonesia, politik uang disebut suap. Istilah lain dari suap adalah uang sogok (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 965). Uang sogok berarti sejumlah uang yang diberikan

¹ Ikhsan ahmad, *pilar demokrasi kelima*, (Yogyakarta: Pt Budi Utama, 2015), h. 84.

² Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 57

kepada petugas tertentu untuk menyogok agar sebuah urusan dapat berjalan dengan lancar.³

Money politic adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, dan ini bisa berupa uang untuk khidmah kepada masyarakat, agar suatu saat akan memihak kepadanya jika ada pengambilan keputusan (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 323), Sementara *money politic* menurut Afan Gaffar adalah tindakan membagi-bagi uang baik sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara (Mohammad, 2002: 329).⁴

Politik Uang menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra dalam harian Jawa Pos tanggal 16 Februari 1999 adalah upaya mempengaruhi massa pemilih dengan imbalan materi. Sedangkan Afan Gaffar memaknai Politik Uang yaitu tindakan membagi-bagi uang (entah itu uang milik suatu kelompok/golongan tertentu maupun pribadi atau pasangan calon) untuk membeli suara.⁵

Masyarakat umum memahami Politik Uang sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya, tindakan Politik Uang itu dilakukan secara sadar oleh pelaku⁶

³ Mashudi Umar, "*Money Politic* Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam", dalam *At-turas*, no. 1/ Januari-Juni 2015, h. 107.

⁴ *Ibid*, h. 108.

⁵ Indra Ismawan, *POLITIK UANGS Pengaruh Uang dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Media Presindo. 2008),h. 4.

⁶ *Ibid*, h. 5

Politik dalam bahasa Arab nya disebut “*siyasyah*” yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya “*politics*”. Politik itu sendiri memang berarti cerdas, dan bijaksana yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan.⁷

2) Batasan-Batasan Politik uang

a. Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam Politik Uang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi nominal hadiah dari pasangan calon kepada masyarakat dalam setiap kampanye pilkada yang menggelar kegiatan kampanye hanya boleh memberikan hadiah maksimal Rp 1jt dan itu harus dalam bentuk barang.⁸

Sebagaimana diatur dalam UU PKPU No.1 Tahun 2013 Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi:

Pasal 49

(2) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye untuk mempengaruhi pemilih.⁹

Dengan demikian, apabila masyarakat mengajukan proposal permohonan bantuan dana atau materi tertentu untuk

⁷ Inu kencana Syafiie, Azhari, *system politik Indonesia*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), h. 6

⁸ Legowo, Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Anggota DPR/DP/DPRD Menghadapi Pemilu*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 33

kepentingan sosial kepada kandidat atau parpol (inisiatif dari masyarakat) kemudian kandidat atau parpol memenuhi permohonan tersebut maka pemberian seperti ini tidak masuk kategori politik uang.

b. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Politik Uang

Politik uang dilarang karena secara moralitas dinilai berkompetisi tidak fair, tidak jujur dan tidak adil, serta dinilai berpengaruh negatif terhadap hasil kompetisi baik bagi yang terpilih maupun masyarakat. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

Pasal 82

(1) Pasangan calon dan / atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.¹⁰

maka pemberian tersebut harus dimaknai sebagai politik uang. Misalnya, kandidat membagi sembako dari rumah ke rumah disertai tanda gambar kandidat atau parpol ditambah pesan kepada yang menerima sembako untuk memilih seperti gambar dimaksud, maka tindakan membagi sembako tersebut jelas-jelas politik uang.

¹⁰ Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014), h. 166

3) Dampak Politik Uang

Banyak sekali dampak yang dihadirkan akibat dari politik uang, Dampak yang ditimbulkan oleh adanya praktek politik uang di antaranya adalah:

a. Dampak *Money Politic* Terhadap Pribadi

Tidak dapat dipungkiri bahwa *money politic* merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang, karena tindakan *money politic*, baik member atau menerima dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu al-'adalah (keadilan) dan ihsan (berbuat baik). Dua karakter ini menjadi indikator baik buruknya akhlak dan prilaku seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya terhadap Allah SWT.¹¹

Sebagaimana firman Allah: (an-nahl:90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”¹²

Jika sifat adil ini hilang dari diri seseorang, maka hal buruk yang akan terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dan posisi yang diamanahkan kepadanya. Wewenang dan jabatan yang diembannya

¹¹ Mashudi Umar, “*Money Politic*,h.113-114.

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya,(Bandung: Diponegoro, 2000),h. 221.

hanyalah menjadi kesempatan untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan yang tidak legal demi memperkaya diri pribadi dan orang lain di luar haknya yang sah (Setiawan, 2003: 15).¹³

b. Dampak *Money Politic* Terhadap Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro sebagaimana dikutip Joko Waluyo, secara ekonomi keberadaan korupsi dan *money politic* atau *risywah* akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan.¹⁴

c. Dampak *money politic* terhadap masyarakat

Tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Yusuf al-Qardhawi, mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzaliman.¹⁵

¹³ Mashudi Umar, "*Money Politic*", h. 114.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, h. 115.

Sementara dari sisi etika politik lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. *Money Politic* bukan secara moral saja yang salah, dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.¹⁶

Mengenai dampak dari *money politic* tentu saja ada dampaknya bagi masyarakat sendiri. *Money politic* bisa dijadikan ajang mencari penghasilan, masyarakat awam tidak mempedulikan nilai nilai dari demokrasi yang terpenting baginya ialah mereka telah mendapatkan uang atau bentuk penyuaipan lainnya.

Imbas kontrak politik uang yang palig kentara dapat dilihat dari perilaku kepala daerah terpilih yang tidak memiliki rasa solidaritas terhadap kesulitan-kesulitan yang yang menimpa rakyatnya. Juga program-program pembangunan yang semestinya berlangsung dengan profesional, transparan, dan dengan hasil kerja (proyek) berkualitas tinggi ternyata tidak berlangsung seperti yang diharapkan. Artinya komisi dan persenan yang mesti dibayarkan di muka sebelum

¹⁶ *Ibid*, h.116.

pekerjaan didapatkan telah menurunkan nilai dan kualitas proyek-proyek pembangunan yang termaktub di APBD daerah bersangkutan.¹⁷

4) Dasar Larangan Politik Uang

Agar orang-orang yang menjadi pemimpin dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar serta ditaati oleh rakyat atau masyarakat, maka para pemimpin atau orang-orang yang mengemban jabatan-jabatan politik (pejabat publik) dituntut untuk memiliki sifat jujur dan amanah serta memiliki keahlian dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya.

Mengingat buruknya akibat politik uang, maka hal ini harus dicegah. Agama Islam sudah memiliki rumus untuk menanggulangnya. Orang yang memberi dan yang diberi harus dihukumkan haram. Orang yang memberi uang agar terpilih berarti sangat menginginkan suatu jabatan, dan hal ini pun dilarang oleh Islam.¹⁸

Orang yang memilih pemimpin melalui Pemilu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi. Jika mereka memilih calon yang tidak layak sebagai pemimpin, karena menerima uang atau sogokan (*money politics*), berarti ia telah melakukan dosa besar. Hal itu menurut Qaradhawi sama dengan memberikan kesaksian palsu dalam perkara peradilan. Begitu juga jika rakyat pemilih memberikan suaranya kepada calon dengan pertimbangan bahwa calon itu kerabat atau orang yang berasal satu daerah dengannya atau karena akan mendapatkan keuntungan pribadi, berarti pemilih demikian telah menyalahi perintah Allah.¹⁹

¹⁷ Bungaran Antonius simanjuntak, *dampak otonomi daerah di Indonesia*, (Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia, 2013), h. 123.

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 193

¹⁹ *ibid.*

2. Pemilihan Kepala Daerah

1) Pengertian Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kepala daerah adalah orang yang mengepalai suatu daerah (pemerintahan).²⁰

Konteks Indonesia, yang dimaksud kepala daerah adalah gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi, Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten, Walikota sebagai Kepala Daerah kota. Kepala daerah untuk tingkatan kabupaten disebut bupati, dan wakilnya disebut wakil bupati. Bupati yaitu jabatan atau sebutan KDH kabupaten yang sebagian besar daerahnya adalah pedesaan meskipun jika terdapat sebagian kecil daerah perkotaan pada wilayahnya.²¹

Menurut Sigit Pamungkas, arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Peserta pilkada dapat berupa perseorangan dan parpol tetapi yang paling utama adalah parpol. Parpol mengajukan kandidat dalam pilkada untuk kemudian dipilih oleh rakyat.²²

²⁰ Wendy Melfa, *Pemilukada*, (Bandar Lampung: BE Press, 2013), h. 5.

²¹ *Ibid*, h. 9.

²² Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: konsep, teori, dan strategi*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2009), h. 359.

2) Pilkada langsung

Pilkada langsung merupakan perubahan penting dalam proses konsolidasi demokrasi di aras lokal. Setidaknya pilkada langsung dipandang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan sistem rekrutmen politik melalui institusi.²³

Pilkada langsung merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Desentralisasi secara garis besar mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. Semangat dilaksanakannya pilkada langsung adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih).²⁴

Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui dewan perwakilan rakyat daerah setempat, maka menurut ketentuan undang-undang no. 32 tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung.²⁵

Disamping rawan politik uang, pemilihan dengan sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) sering kali menghasilkan kepala daerah yang tidak populer dan tidak mengenal karakter dan potensi khas daerah. Banyak calon yang tidak dikenal luas oleh masyarakat.²⁶

²³ Suharizal, *Pemilukada: regulasi, dinamika, dan konsep mendatang*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011), h. 38.

²⁴ *Ibid*, h. 42.

²⁵ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, H. 259.

²⁶ *Ibid*, h. 19.

B. EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Ekonomi Islam merupakan tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari penghidupan individu atau kelompok sesuai dengan ajaran Islam.²⁷

Beberapa ahli mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam.²⁸

Dari pengertian di atas bahwa Ekonomi Islam adalah ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia dalam nilai-nilai Islam. Dengan tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari penghidupan individu atau kelompok sesuai dengan ajaran Islam.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu al-qur'an dan as-

²⁷ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, h. 3

²⁸ Veithzal Rivai, Andi Buchari, M.M., *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 1

suanah yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Maka dalam ekonomi islam terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Pinsip Ketauhidan

Tauhid adalah landasan utama dalam setiap bentuk bangunan yang ada dalam syarat Islam. Islam menawarkan keterpaduan Agama, Sosial, dan Ekonomi, dalam bentuk kesatuan ajaran. Tauhid menggambarkan hubungan antara manusia dengan tuhan. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya.²⁹

b. Prinsip Keadilan

Keadilan didalam al-qur'an, kata adil disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran islam, terutama dalam kehidupan hukum social, politik dan ekonomi.³⁰

Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya. Keadilan keadilan juga harus diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakat, infak, dan hibah.³¹

Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

²⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*, (Bandung: Cv Pustaka Setia), h. 22

³⁰ Nurul huda et al, *ekonomi makro islam*, (Jakarta: kencana, 2008), h. 5

³¹ *Ibid.*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٣٢﴾

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.³³

Keadilan merupakan keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau komunitas. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT haruslah memiliki sifat yang adil dalam bertindak dalam memperlakukan sesama hamba Allah SWT.³⁴

Allah SWT menekankan keadilan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³⁵

³²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya,(Bandung: Diponegoro,2000), h. 69.

³³ Nurul Huda et al, *ekonomi makro*.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Bandung: J-ART, 2004),

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa manusia diharapkan agar berlaku adil. Begitu pula bagi seorang pedagang, dalam jual beli hendaknya berlaku adil saat memberikan harga jual. Keadilan dalam memberlakukan pembeli satu dengan pembeli lainya tanpa membedakan.

c. Prinsip Pertanggung jawaban

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggungjawabkan di akhirat.³⁶

Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 281:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).³⁷

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa seorang muslim harus takut akan datangnya hari ketika kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian kebaikan dan kejahatan seseorang akan diberi

³⁶ Eko Suprayito, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2-3

³⁷ *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.47

balasan yang sesuai. Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar, dan berusaha dengan cara yang batil.

d. Kebebasan individu

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah Negara islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.³⁸

³⁸ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan *field research*. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut.¹ Objek dalam penelitian ini adalah informasi yang dibutuhkan peneliti berada di lapangan yaitu informasi dari masyarakat di beberapa Desa Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat pemahaman secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.² Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.³

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan-keadaan sesuatu yang akan diteliti.

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 3

² Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h.34

³ *Ibid*, h.35

Khususnya peneliti di sini akan meneliti politik uang yang terjadi di Kecamatan Pekalongan.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan,⁵ dan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.

Sumber pokok dalam politik uang menjelang pilkada adalah data yang diperoleh dari masyarakat dan beberapa perangkat desa.

Namun disini peneliti hanya meneliti sebanyak sepuluh warga yang terdiri dari beberapa perangkat desa dan masyarakat sekitar, karena peneliti menggunakan teknik *quota sampling*. Teknik *quota sampling* yaitu pengambilan anggota sampel berdasarkan jumlah yang diinginkan oleh peneliti.⁶

2. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 102

⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h.129

⁶ Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.116

skunder.⁷ Dapat juga dikatakan bahwa data skunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.

Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang politik uang, dan ekonomi islam, diantaranya adalah:

- a. Inu kencana Syafiie, Azhari, *system politik Indonesia*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006)
- b. Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)

C. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu.⁸

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹ Maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁷ *Ibid*

⁸ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.116

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014), h.62

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰ Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancara tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.¹¹

Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaan dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:¹²

a. Wawancara berstruktur

Pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.

b. Wawancara tak berstruktur

Pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada hal-hal tertentu.

c. Campuran

Bentuk ini merupakan campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* h. 186

¹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*,

¹² w. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gransindo, 2002), h.120-121

Dalam hal ini wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tak berstruktur, karena bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya) responden yang dihadapinya.

Adapun informan dalam penelitian mendalam ini yaitu ditujukan kepada beberapa perangkat desa, beserta masyarakat lainnya yang menerima bantuan tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.¹³ Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan harian, sejarah-sejarah kehidupan, ceritera-ciretera, biografi-biografi, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan.

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁴

¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.82

¹⁴Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.*, h. 51.

Dokumentasi adalah penyelidikan terhadap hal-hal atau variabel tertulis berupa catatan, transkrip, buku, catatan harian, dan sebagainya.¹⁵

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya. Semua bahan-bahan itu dipilih dan dikualifikasi berdasarkan jenisnya, karena bahan-bahan itu merupakan data primer yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menyatakan bahwa dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen contohnya adalah keterangan dan data yang berasal dari kepala desa.

Pada saat melaksanakan metode dokumentasi penulis menyelidiki benda-benda tertulis, seperti dokumen-dokumen, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam prakteknya, penulis diberi dokumen resmi oleh kepala desa.

Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Dengan dokumentasi, peneliti mencatat tentang profil desa yang meliputi sejarah berdirinya, dan lain sebagainya

D. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif.¹⁶

Analisis induktif bermakna analisis yang dimulai dengan melakukan

¹⁵Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.107

¹⁶ Ilexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, PT. Remaja Rosadakarya, 2012), h. 10

observasi spesifik menuju terbentuknya pola umum.¹⁷ Dengan menggunakan metode induktif, dapat disusun pengetahuan yang berlaku secara umum.¹⁸

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir. Cara berfikir yang digunakan adalah induktif.

Metode berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Maksudnya yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang bersifat khusus kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Data yang didapat dari analisis lokasi tersebut kemudian didokumentasikan. Selanjutnya data-data tersebut diadakan pengolaan dan pengamatan kemudian diambil kesimpulan.

¹⁷ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Revika Aditama, 2012), h. 188

¹⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, h. 3

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pekalongan

1. Sejarah Kecamatan Pekalongan

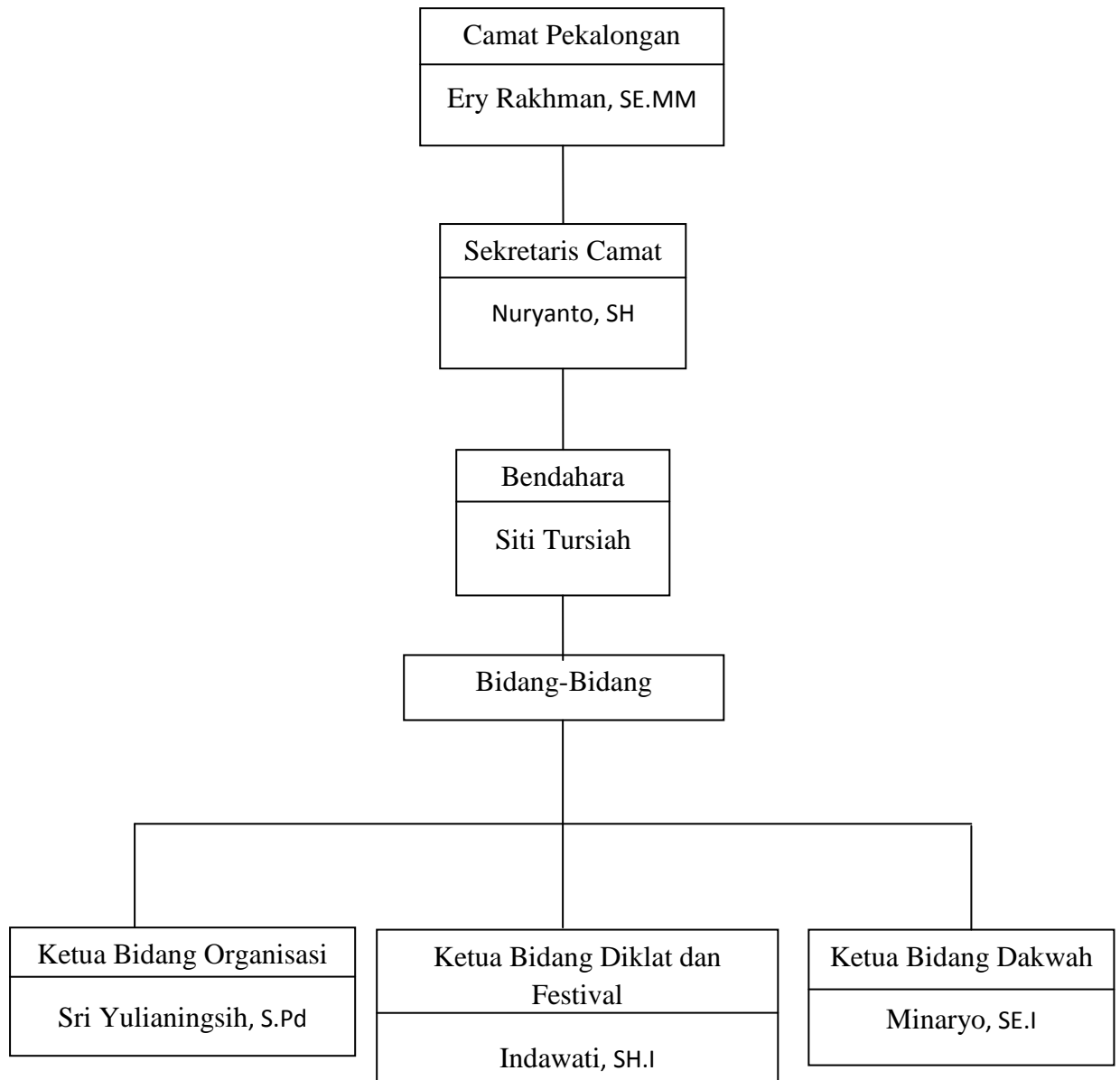
Kecamatan Pekalongan merupakan bagian wilayah Kabupaten Lampung Timur yang berpenduduk 46.199 jiwa. Pekalongan memiliki wilayah seluas 110,04 km². Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999. Wilayah administrative kecamatan ini terbagi menjadi dua belas desa, yaitu Aadirejo, Sidodadi, Gondangrejo, Siraman, Pekalongan, Tulusrejo, Jojog, Gantiwarno, Kalibening, Wonosari, Adijaya, Gantimulyo.¹

Secara geografis batasan wilayah kecamatan Pekalongan sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Nuban
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Batanghari
- c. Sebelah Timur berbatsan degan kecamatan Batanghari Nuban
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kota Metro

¹ Nuryanto, wawancara dengan sekretaris camat, tanggal 15 Juni 2017

2. Struktur Pemerintahan kecamatan Pekalongan



3. Sarana dan prasarana

Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Pekalongan. Hal itu terlihat dari keberadaan sarana ibadah berupa masjid dan mushola yang mendominasi di kecamatan ini. Masjid merupakan sarana ibadah yang terbanyak dengan jumlah sekitar 78 masjid, selain itu terdapat pula sekitar 60 mushola, 15 gereja dan beberapa pura dan wihara.²

Sarana pendidikan di Pekalongan tersedia dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah kejuruan. Beberapa lembaga pendidikan anak usia dini mulai bermunculan pula dalam kurun beberapa tahun terakhir. Sarana kesehatan yang tersedia di Pekalongan didominasi oleh Posyandu dengan jumlah sekitar 61 unit. Selain itu, di kecamatan ini juga terdapat 7 Puskesmas atau Puskesmas pembantu, 6 Poskesdes, 13 rumah bersalin, 10 Praktik Kesehatan dan 2 Poliklinik. Jumlah tenaga kesehatan di Pekalongan pada tahun 2017 sebagian besar merupakan tenaga kesehatan medis seperti bidan, perawat, dan dokter.³

4. Kondisi penduduk

a. Pertanian

Pada subsektor peternakan hewan besar, jenis mamalia kambing merupakan komoditas terbanyak yang dibudidayakan dengan

² Dokumentasi kecamatan Pekalongan tahun 2017

³ *Ibid*

jumlah sekitar 5.087 ekor. Selanjutnya untuk populasi domba yang dibudidayakan tercatat 465 ekor, kerbau 45 ekor dan babi 18 ekor.

Dikecamatan ini juga terdapat sebuah unit Produksi Benih Tanaman Buah Pekalongan yang merupakan bagian dari UPTD Balai Benih Induk Dinas Pertanian.⁴

b. Industri

Sebagian besar Industri pengolahan yang ada di Pekalongan dikelompokkan sebagai industri rumah tangga dengan jumlah 1.878 unit industri. Selain itu, terdapat pula 21 perusahaan industri kecil dan sebuah industri sedang yang beroperasi di kecamatan ini.⁵

c. Energi

Pengaliran listrik oleh PLN telah mencapai seluruh desa yang ada di Pekalongan. Jumlah pelanggan listrik PLN pada 2016/2017 terbanyak terdapat di Desa Gondangrejo dengan jumlah 1.680 pelanggan, Sementara di Desa Adirejo sebanyak 1.350 pelanggan, Desa Adijaya sebanyak 920 pelanggan, Desa Wonosari sebanyak 960 pelanggan, Desa Kalibening sebanyak 672 pelanggan, Desa Gantiwarno sebanyak 945 pelanggan, Desa Sidodadi sebanyak 1.561 pelanggan, Desa Siraman sebanyak 1.050 pelanggan, Desa Pekalongan sebanyak 1.315 pelanggan, Desa Tulusrejo sebanyak 946 pelanggan, Desa Jojog sebanyak 1.292 pelanggan, Desa Gantimulyo sebanyak 494 pelanggan.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

5. Jumlah Penduduk Per desa Pekalongan

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Adirejo	4445
2	Sidodadi	5227
3	Gondangrejo	6535
4	Siraman	3850
5	Pekalongan	4239
6	Tulusrejo	3450
7	Jojog	4636
8	Gantiwarno	3254
9	Kalibening	2252
10	Wonosari	3315
11	Adijaya	2942
12	Gantimulyo	2174

B. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kecamatan Pekalongan

Berdasarkan hasil Penelitian, peneliti dapat menganalisa bahwasanya Politik uang dilaksanakan di kecamatan pekalongan pada saat menjelang pemilihan Kepala Daerah. Untuk dapat mengetahui kebenarannya, peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga setempat di beberapa desa kecamatan Pekalongan, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk-Bentuk Bantuan dari Para Calon Kepala Daerah

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di beberapa desa maka dapat diketahui bentuk-bentuk bantuan yang diberikan oleh para calon Kepala Daerah yaitu sebagai berikut:

- a) Sembako dan souvenir berupa sarung diterima oleh Bapak Subardi dari desa Gondangrejo
- b) Sembako dan souvenir berupa jilbab diterima oleh Ibu Sri dari desa Gondangrejo dan Ibu Sulis dari desa Sidodadi
- c) Uang tunai diberikan untuk mengisi kas pengajian jamaah muslimat di Desa Sidodadi
- d) Sembako dan kalender diterima oleh Ibu Tanti dari Desa Tulusrejo

Sebagaimana wawancara berikut ini:

Menurut penuturan Bapak Subagio selaku tokoh masyarakat di Desa Gondangrejo, beliau menuturkan bahwa terjadi praktek Politik uang yang dilakukan oleh para calon Kepala Daerah di desa Gondangrejo, beliau juga menyebutkan bentuk dari Politik Uang tersebut yaitu berupa bantuan seperti sembako, uang tunai, dan juga berbagai macam souvenir, akan tetapi yang mendapatkan uang tunai hanyalah warga terdekat dari kader atau tim sukses tersebut.⁶

Seperti halnya menurut penuturan Bapak Subardi selaku sekretaris desa di Desa Gondangrejo, beliau mengatakan bahwa beliau menerima bantuan berupa sembako dan souvenir berupa sarung disertai

⁶ Bapak Subagio, tokoh Masyarakat di desa Gondangrejo, *wawancara* minggu, 10 Juni 2017

stiker bergambarkan foto calon tersebut. bantuan yang diberikan kepada Masyarakat dilakukan untuk memperkenalkan diri sebagai calon dan untuk mendapat simpati dari masyarakat agar memenangkan suara atau posisi yang diinginkannya oleh setiap para calon kepala Daerah.⁷

Menurut penuturan Ibu Sri selaku ketua jama'ah yasin ibu-ibu di Desa Gondangrejo bahwa beliau mendapatkan souvenir berupa jilbab yang dibagikan pada saat acara rutinitas yasinan, beliau juga menerima bantuan sembako yang dibagikan dari rumah ke rumah oleh tim sukses para calon, menurutnya bantuan tersebut bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya.⁸

Sedangkan menurut Bapak Iwan selaku kaur desa di Desa Sidodadi, beliau menuturkan bahwa bantuan tersebut berupa barang seperti sembako, jilbab dan uang tunai yang diberikan untuk mengisi kas jamaah pengajian Muslimat. bantuan-bantuan dari para calon kepala daerah diberikan kepada seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya masyarakat miskin saja namun masyarakat yang terbilang cukup mampu juga mendapatkan bantuan tersebut,⁹

Sebagaimana penuturan Ibu Sulis salah satu anggota PKK di Desa Sidodadi, beliau mengatakan bahwa selain mendapatkan sembako beliau juga menerima souvenir berupa jilbab, beliau mau menerimanya

⁷ Bapak Subardi, Sekertaris desa di desa Gondangrejo, *wawancara* 17 Juni 2017

⁸ Ibu Sri, ketua yasin ibu-ibu di desa Gondangrejo, *wawancara* 17 Juni 2017

⁹ Bapak Iwan, selaku kaur desa di desa Sidodadi, *wawancara* 17 Juni 2017

karena bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk acara pengajian atau lain sebagainya.¹⁰

Berbeda dengan penuturan Ibu Winarni selaku ketua jamaah Muslimat di Desa Tulusrejo, beliau mengatakan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh para calon yaitu berupa sembako dan souvenir seperti sajadah dan sarung. Beliau juga mengatakan bahwa pada masa kampanye salah satu calon Kepala Daerah mengadakan pengajian akbar muslimat di Desa Tulusrejo.¹¹

Menurut penuturan Ibu Tanti beliau adalah ibu rumah tangga yang juga mendapatkan bantuan sembako berupa gula pasir, beras, dan minyak makan selain itu beliau juga mendapatkan kalender yang bergambarkan foto calon Kepala Daerah tersebut, menurut beliau barang-barang tersebut cukup bermanfaat untuk kebutuhan makanan dan hampir setiap warga mendapatkannya.¹²

Bapak Bambang selaku pengurus masjid di Desa Gondangrejo, beliau menuturkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap bantuan tersebut sangatlah baik, bahkan masyarakat menyambutnya dengan senang hati, justru menjelang pemilihan dijadikan ajang untuk mendapatkan rejeki.¹³

¹⁰ Ibu Sulis, anggota PKK di desa Sidodadi, *wawancara* 17 Juni 2017

2017 ¹¹ Ibu Winarni, selaku ketua jamaah muslimat di desa Tulusrejo, *wawancara* 17 Juni

¹² Ibu Tanti, Ibu rumah tangga di desa Tulusrejo, *wawancara* 17 Juni 2017

2017 ¹³ Bapak Bambang, selaku Pengurus masjid di desa Gondangrejo, *wawancara* 17 Juni

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk bantuan atau pemberian dari para calon Kepala Daerah termasuk dalam Politik Uang, karena dengan menerima bantuan tersebut masyarakat diminta untuk memilih dan mendukung calon yang memberikan bantuan. sebagaimana dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pasangan calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Kemudian peneliti juga dapat menganalisis dalam prinsip Ekonomi Islam sebagai berikut:

1) Prinsip Kesatuan/Ketauhidan

Kesatuan atau Ketauhidan berarti segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Oleh sebab itu segala aktivitas manusia harus mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah ditetapkannya.

Berdasarkan penelitian pada beberapa desa di kecamatan Pekalongan, prinsip kesatuan belum diterapkan oleh para calon Kepala Daerah dalam menjalankan aktivitas atau usahanya untuk mendapatkan suara rakyat dan memenangkan pemilihan, karena para calon tersebut telah melanggar aturan-aturan dalam islam. Islam

memerintahkan manusia untuk berbuat jujur dan melarang manusia untuk berbuat curang, sedangkan para calon melakukan usahanya dengan cara yang curang, hal tersebut sama halnya dengan suap.

2) Prinsip Keadilan

Keadilan dapat diartikan dengan tindakan yang tidak membeda-bedakan. Sebagai umat muslim, manusia hendaknya bersikap adil dalam memperlakukan manusia lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara di kecamatan Pekalongan, keadilan belum diterapkan oleh para calon Kepala Daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, dimana pada saat memberikan bantuan berupa uang tunai para calon Kepala Daerah tidak membagikan secara merata kepada masyarakat. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Subagio selaku tokoh masyarakat di Desa Gondangrejo, beliau mengatakan bahwa yang mendapatkan uang tunai hanyalah warga yang terdekat dengan tim sukses, maka saat memberikan bantuan harus secara adil dan tidak menimbulkan kecemburuan antar warga.

2. Cara Pemberian Bantuan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat diketahui cara pemberian bantuan yg dilakukan oleh para calon Kepala Daerah yaitu sebagai berikut:

a) Bantuan dibagikan dari rumah ke rumah

b) Bantuan disalurkan melalui acara pengajian dan acara yasinan rutinitas

Sebagaimana wawancara berikut ini:

Menurut Bapak Iwan selaku kaur desa di Desa Sidodadi, beliau menuturkan bahwa bantuan-bantuan tersebut diberikan melalui kader atau tim sukses dari para calon yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, adapun bantuan berupa sembako dibagikan dari rumah ke rumah, sedangkan souvenir di berikan ketika acara pengajian atau yasinan rutin, kemudian setiap bantuan yang diberikan selalu disertai dengan stiker yang bergambarkan foto calon tersebut.¹⁴

Menurut Bapak Mungin selaku tokoh agama di Desa Sidodadi, beliau juga menuturkan bahwa bantuan-bantuan tersebut diberikan melalui tim suksesnya, Bapak Mungin juga mengatakan bahwa Politik Uang seharusnya tidak diperbolehkan, namun hal tersebut justru sudah menjadi budaya politik pada saat menjelang pemilihan Kepala Daerah, bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat terbilang hal yang sudah biasa dan merupakan hal yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat setiap menjelang pemilihan¹⁵

Bapak Purwadi selaku kaum di Desa Gondangrejo, beliau juga menuturkan hal yang sama dengan penuturan bapak Mungin selaku tokoh agama didesa Sidodadi bahwa praktik Politik Uang dilarang dalam Islam

¹⁴ Bapak Iwan, selaku kaur dessa di desa Sidodadi, *wawancara* 17 Juni 2017

¹⁵ Bapak Mungin, selaku tokoh agama di desa Sidodadi, *wawancara* 17 Juni 2017

akan tetapi hal tersebut sudah dianggap sebagai kebiasaan pada saat menjelang pemilihan.¹⁶

Menurut penuturan Ibu Eni salah satu anggota yasinan ibu-ibu di Desa Tulusrejo, beliau menuturkan bahwa selain mendapatkan sembako beliau juga menerima souvenir berupa sajadah yang dibagikan pada saat acara yasinan rutin. Ibu Eni juga mengatakan bahwa beliau mau menerimanya karena sajadah dapat dimanfaatkan untuk beribadah.¹⁷

Bapak Ali ketua jamaah yasin di Desa Tulusrejo beliau juga mengatakan bahwa sarung yang beliau terima dari calon Kepala Daerah dibagikan oleh para kader dari rumah ke rumah, beliau juga mengatakan bahwa setiap menjelang pemilihan, masyarakat selalu mengharapkan bantuan dari para calon, dan hampir setiap warga berharap mendapatkan bantuan tersebut, begitu juga masyarakat menerimanya dengan senang hati.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang cara pemberian bantuan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa cara pemberian bantuan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah termasuk dalam Politik Uang, karena dilihat dari cara pemberiannya melalui tim sukses yang kemudian di salurkan saat acara-acara tertentu atau diantarkan langsung dari rumah ke rumah selalu disertai dengan permintaan dukungan seperti mempengaruhi masyarakat atau dengan memberikan stiker bergambarkan foto calon tersebut.

¹⁶ Bapak Purwasi, selaku kaum di desa Sidodadi, *wawancara* 17 Juni 2017

¹⁷ Ibu Eni, anggota yasinan ibu-ibu didesa Tulusrejo, 17 Juni 2017

¹⁸ Bapak Ali, selaku ketua jamaah yasin bapak-bapak di desa Tulusrejo, *wawancara* 17

Berdasarkan wawancara diatas peneliti juga dapat menganalisis dalam prinsip Ekonomi Islam sebagai berikut:

1) Prinsip Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat, karena manusia tidak hidup sendiri, maka tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya. Seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat.¹⁹

Sebagaimana di sebutkan dalam Al-ur'an surat Al-baqarah ayat 281:

وَأْتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ^ط ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang Sempurna terhadap apa yang Telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).²⁰

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa seorang muslim harus takut akan datangnya hari ketika kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian kebaikan dan kejahatan seseorang akan diberi balasan yang

¹⁹ Eko Suprayito, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2-3

²⁰ *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 47

sesuai. Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar, dan berusaha dengan cara yang bathil.

Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Pekalongan, bahwa prinsip tanggung jawab belum diterapkan oleh para calon Kepala Daerah dalam melakukan usaha untuk mencapai tujuannya. Aktifitas pemberian bantuan tersebut termasuk berusaha dengan cara yang bathil, karena untuk mendapatkan suara dan memenangkan pemilihan tersebut mereka melakukan cara yang tidak benar. Sebagaimana penuturan dari Bapak Mungin selaku tokoh agama di Desa Sidodadi, beliau menuturkan bahwa Politik Uang seharusnya tidak diperbolehkan, karena hal itu sama dengan suap menyuap.

2) Prinsip Kebebasan Individu

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah Negara islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Pekalongan, bahwa prinsip kebebasan individu belum diterapkan oleh para calon Kepala Daerah dalam melakukan usahanya untuk memenangkan pemilihan Kepala Daerah, karena yang dilakukan oleh para calon sama halnya

dengan membatasi atau tidak membiarkan masyarakat berpendapat dan mengambil keputusan dengan bebas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Pekalongan dan analisis yang telah peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa dilihat dari prinsip Ekonomi Islam maka Politik Uang seharusnya dilakukan dengan cara yang jujur yaitu tidak melanggar aturan islam dan batasan-batasan yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan dengan cara yang adil, bertanggungjawab, dan tidak membatasi kebebasan individu. Namun yang terjadi di Kecamatan Pekalongan yaitu Politik Uang dilakukan dengan cara yang tidak adil karena para Calon Kepala Daerah memberikan bantuan berupa uang tunai tidak kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang kurang mampu akan tetapi diberikan kepada orang-orang tertentu yang dekat dengan para kader, kemudian dengan adanya Politik Uang maka kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihan atau mengambil keputusan menjadi terbatas karena masyarakat telah menerima bantuan tersebut.

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa Politik Uang yang terjadi di Kecamatan Pekalongan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

B. Saran

1. Kepada para Calon Kepala Daerah Sebaiknya perlu memperhatikan aspek moral agar dapat menjadi seorang pemimpin yang jujur dan layak untuk dipilih, selain itu juga agar dapat bersaing secara sehat dan berusaha dengan cara yang benar.
2. Kepada masyarakat umum agar dapat memperhatikan aspek syar'i dalam mengambil tindakan atau keputusan, terutama dalam hal praktek suap menyuap, agar dapat membedakan mana yang pantas untuk dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Bungaran Antonius simanjuntak, *dampak otonomi daerah di Indonesia*, Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia, 2013
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000
- Didik Suharianto, "Dampak Money Politics Hasil Pemilu Kepala Daerah Terhadap Konstitusi Dan Kebijakan Pemerintah Daerah", *Jurnal Ilmiah PROGRESIF*, No. 21/desember 2010
- Eko Suprayito, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Fitria Pratiwi, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT visi media pustaka, 2015
- Fitriyah, "Cara Kerja Politik Uang : Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati", *POLITIKA*, No. 2/Oktober 2015
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: konsep, teori, dan strategi*, Jakarta: Pt Raja grafindopersada, 2009
- Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.
- Ikhsan ahmad, *pilar demokrasi kelima*, Yogyakarta: Pt Budi Utama, 2015
- Indra Ismawan, *POLITIK UANGS Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo. 2008

- Inu kencana Syafiie, Azhari, *system politik Indonesia*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006
- Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Legowo, Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Anggota DPR/DP/DPRD Menghadapi Pemilu*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*, Bandung: Cv Pustaka Setia
- Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa MUI*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2013
- Mashudi Umar, “*Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*”, dalam *At-turas*, no. 1/ Januari-Juni 2015.
- Morissan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad sharif chaundhry, *System Ekonomi Islam*, Jakarta: prenada media group, 2012
- Nurul huda et al, *ekonomi makro islam*, Jakarta: kencana, 2008
- Purbayu Budi Santosa , “Gangguan Politik Uang Terhadap Pembangunan” dalam *Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, No. 1/ Maret 2006
- Saldi Isra, *Kekuasaan Dan Perilaku korupsi*, Jakarta: Pt Kompas Media Nusantara, 2009
- Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Suharizal, *Pemilukada: regulasi, dinamika, dan konsep mendatang*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)

- Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Revika Aditama, 2012
- Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economic*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gransindo, 2002
- Wendy Melfa, *Pemilukada*, Bandar Lampung: BE Press, 2013
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997
- Zainuddin Hamidy, et al., *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Jilid 4, Jakarta; Wijaya, 1996
- Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Zulkarnain, "Kajian Penegakan Hukum Pasca Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal KONSTITUSI*, (Puskasi FH Universitas Widyagama Malang), No.2/ November 2010

POLITIK UANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur Tahun 2015
Di Kecamatan Pekalongan)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah
1. Politik Uang
 - a. Pengertian Politik Uang
 - b. Batasan-Batasan Politik Uang
 - c. Dampak Politik Uang
 - d. Dasar Larangan Politik Uang
 2. Pemilihan Kepala Daerah
 - a. Pengertian Pilkada
 - b. Pilkada Langsung
- B. Ekonomi Islam
1. Konsep Ekonomi Islam
 2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknis Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

B. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Di
Kecamatan Pekalongan

1. Bentuk-bentuk bantuan dari calon Kepala Daerah

2. Cara pemberian Bantuan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah

C. Analisis Politik Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

Metro, Juni 2017

POLITIK UANG PERSPEKTIF EKONOMI

Peneliti

(Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur)

Kelompok Paksi (g)

Neni Meilinda

NPM. 1288644

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, MH

NIP.19670316 199503 1 001

Imam Mustafa, M.S.I

NIP. 198204122009011016

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
POLITIK UANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur Tahun 2015 Di
Kecamatan Pekalongan)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

- a. Adakah praktik Politik Uang menjelang pemilihan Kepala Daerah?
- b. Apa sajakah bentuk-bentuk Politik Uang tersebut?
- c. Faktor apakah yang membuat para calon kepala Daerah melakukan politik uang?
- d. Bagaimanakah menurut anda tentang Politik Uang?
- e. Siapa sajakah yang mendapatkan bantuan/ sumbangan tersebut?
- f. Bagaimana cara para calon memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat?
- g. Kapan atau pada saat apa para calon memberikan bantuan?

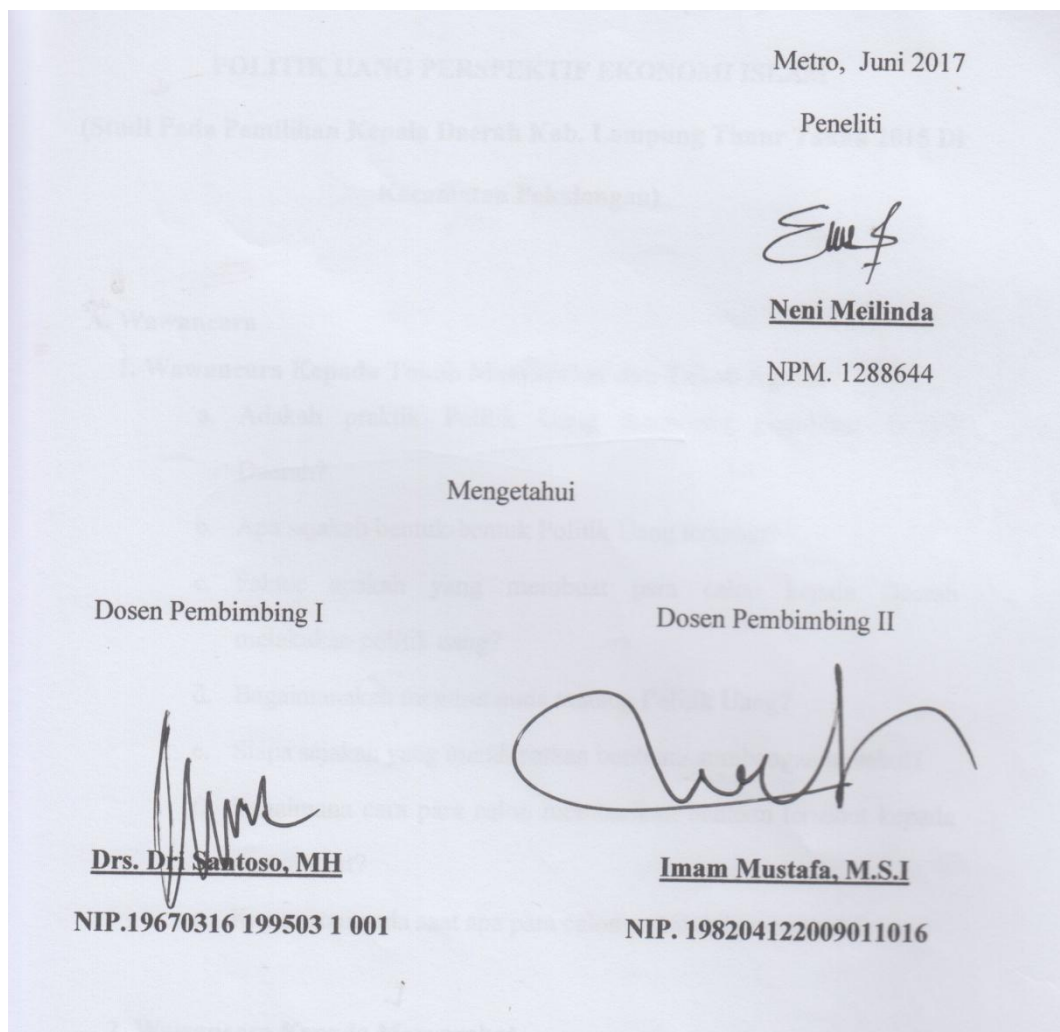
2. Wawancara Kepada Masyarakat

- a. Kegiatan apa sajakah yang dilakukan para calon pada saat kampanye diselenggarakan?
- b. Apa saja bantuan yang diberikan selain bantuan uang tunai dan sembako?
- c. Pada saat apa para calon memberikan bantuan?
- d. Bermanfaatkah bantuan-bantuan tersebut bagi masyarakat?
- e. Mengapa masyarakat mau menerima bantuan tersebut?

f. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap bantuan tersebut?

1. Dokumentasi

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
2. Data yang berkaitan dengan profil kecamatan Pekalongan?





KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax
 (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Neni Meilinda

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Syariah/Esy

NPM : 1288644

Semester/TA : VIII/2015-2016

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 10-6-2016	Tulis Bab I yg mengandung Referensi Jurnal	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustafa, M.S.I
 NIP. 198204122009011016

Neni Meilinda
 NPM. 1288644



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Neni Meilinda

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Syariah/Esy

NPM : 1288644

Semester/TA : IX/2016-2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/ 17-10-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Referensi di Latar belakang Masalah menggunakan 5 jurnal - Perbaiki rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. - Perbaiki penelitian relevan. 	
2.	Sabtu/ 5-11-2016	<p>LBM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsep Sedekah - Fenomena Sedekah menjelang Pemilu yang terjadi di desa Adijaya. 	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Imam Mustafa, M.S.I
 NIP. 198204122009011016

Neni Meilinda
 NPM. 1288644

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO		No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507		No. Revisi	RO
			Tgl. Berlaku	-
			Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL				

Nama : Neni Meilinda
 NPM : 1288644

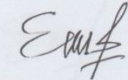
Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
 Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 24-1-2017	✓	Ada 10 pembimbing	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

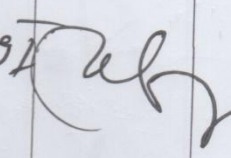
Imam Mustafa, M.S.I
 NIP. 198204122009011016


Neni Meilinda
 NPM. 1288644

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL		

Nama : Neni Meilinda
NPM : 1288644

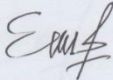
Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 24-1-2017	✓	Ada 10 pembimbing	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustafa, M.S.I
NIP. 198204122009011016


Neni Meilinda
NPM. 1288644



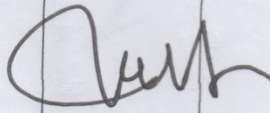
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Neni Meilinda**
NPM : 1288644

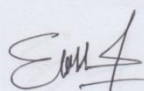
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 20-6-2017		Acc outline Acc APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.SI
NIP.19820412 200901 1 016


Neni Meilinda
NPM. 1288644



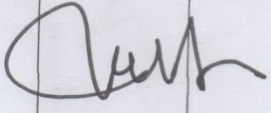
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Neni Meilinda**
NPM : 1288644

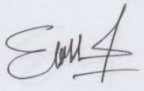
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 20-6-2017		Acc outline Acc APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.SI
NIP.19820412 200901 1 016


Neni Meilinda
NPM. 1288644

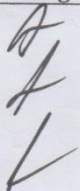


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

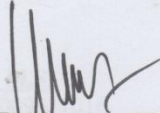
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

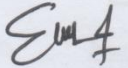
Nama : **Neni Meilinda** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
 NPM : 1288644 Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 21-6-2017		ACC BAB 1,2,3 ACC outline ACC APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Drs. Dri Santoso, MH
 NIP. 19670316 199503 1 001


Neni Meilinda
 NPM. 1288644



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Khi hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

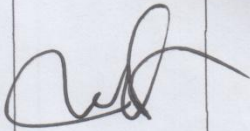
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : neni meilinda

Fakultas /Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Esy

NPM : 1288644

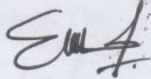
Semester/TA : X/2017

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 10-7-2017	Analisa :- Bentuk pemberian termasuk dalam politik uang atau tidak - cara pemberian termasuk dalam politik uang atau tidak	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa YBS,

Imam Mustofa, M.SI
 NIP. 198204122009011016


Neni Meilinda
 NPM. 1288644

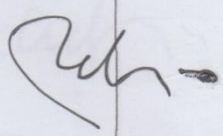


KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax
 (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KOLSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

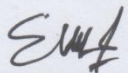
Nama : Neni Meilinda Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 NPM : 1288644 Semester/TA : X/2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 13-7-2017	Ace Bal 10 Kepulauan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa
 NIP. 198204122009011016


Neni Meilinda
 NPM. 1288644

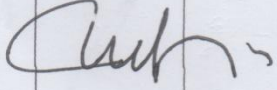
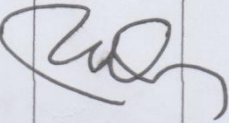


KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax
 (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Neni Meilinda Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 NPM : 1288644 Semester/TA : X/2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 17-7-2017	Ace bab IV - V	
		Ace Abstrak	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa
 NIP. 198204122009011016

Neni Meilinda
 NPM. 1288644



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax
 (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Neni Meilinda

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1288644

Semester/TA : X/2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 18-7-2017	Kelelahan dan kebingungan dalam menulis skripsi.	<i>[Signature]</i>
		Kapan terbitnya skripsi skripsi.	<i>[Signature]</i>
		Cara penulisan skripsi skripsi.	<i>[Signature]</i>
		Cara penulisan skripsi skripsi.	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing I

[Signature]
Drs. Dri Santoso, MH
 NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs.

[Signature]
Neni Meilinda
 1288644



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Neni Meilinda

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 1288644

Semester/TA : X/2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 20-7-2017	Ace - bus 11/11	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Dri Santoso, MH
 NIP.196703161995031001

Neni Meilinda
 1288644



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016

Metro, 29 April 2016

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, MH
2. Imam Mustofa, M.S.I

di -

Metro

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Neni Meilinda
 NPM : 1288644
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
 Judul : Sedekah Menjelang Pemilu Menurut Perspektif Ekonomi Islam
 (Study Kasus Warga Di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Ketua Jurusan,


Siti Zulaikha, S.Ag., MH
 NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 3442/In.28/R.1/TL.00/07/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Camat Kecamatan
Pekalongan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3441/In.28/R/TL.01/07/2017, tanggal 24 Juli 2017 atas nama saudara:

Nama : **NENI MEILINDA**
NPM : 1288644
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Syaria`h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kecamatan Pekalongan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLITIK UANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur 2015 di Kecamatan Pekalongan)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juli 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,



Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-920/In.28/S/OT.01/07/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NENI MEILINDA
NPM : 1288644
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 1288644.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 19 Juli 2017
Kepala Perpustakaan

[Signature]
Drs. Mokhtarjdi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 30 Mei 1994, anak bungsu dari pasangan Bapak Suradi (Alm) dan Ibu Sunarti.

Riwayat pendidikan penulis ditempuh di TK Pertiwi Adirejo lulus pada tahun 2000, mulai di Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Adirejo lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 02 Pekalongan lulus pada tahun 2009, dan pendidikan menengah atas di tempuh di MAN 2 Metro dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN METRO Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2012/2013.